



**SUMBER BERITA**

**SELASA, 19 OKTOBER 2021**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Kasus Seragam Tunggu Audit

### Sebelum Penetapan Tersangka Korupsi

**MUKOMUKO** – Penyidik Kejari Mukomuko tengah menunggu hasil hasil audit untuk memastikan besaran kerugian negara (KN) dalam pengadaan seragam Lulus di salah satu OPD Pemkab Mukomuko. Penghitungan KN masih ditangani Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita masih menunggu hasil audit penghitungan KN dari BPKP. Ini penting untuk kelanjutan penanganan kasus," kata Kajari Mukomuko Rudi Is-

perbuatan ini," jelasnya.

Sementara itu, untuk penanganan permasalahan adanya dugaan penggunaan dana penyertaan modal di Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Pasar Bantal Kecamatan Teraming Jaya, disebutnya belum dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Mukomuko. Pasalnya, dari hasil penghitungan Inspektoral Daerah (Ipda) Mukomuko, uang penyertaan modal yang masih harus ditagih sekitar Rp 50 juta. "Jumlah itu, masih dibawah nilai yang untuk penanganan perkara Pidsusnya, diatas Rp 150 juta," sampainya. \*

Oleh sebab itu, permasalahan itu

kandar, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Sarimonang Beny Sinaga, SH, MH.

Dijelaskannya, audit KN menjadi salah satu unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun dalam pemeriksaan hingga gelar perkara sudah jelas bagaimana modus yang dilakukan. Dan siapa-siapa saja pihak yang mestinya bertanggung jawab. Namun tanpa hasil audit KN, maka unsur untuk melanjutkan penanganan perkara menjadi kurang.

"Kita tidak bisa melanjutkan, karena belum ada hasil audit KN-nya. Unsur audit KN masih diperlukan. Setelah ada, sempurna lah, siapa saja pihak yang terkait dalam melakukan

akan dilimpahkan ke Ipda Mukomuko, untuk mendorong pengembalian uang Rp 50 juta tersebut. Jika Ipda sudah tidak mampu, diharapkan melayangkan surat ke Kejari Mukomuko. Untuk hal itu ditangani oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Pidsus itu diatas Rp 150 juta. Jadi kita limpahkan Seksi Datun melalui Inspektorat Daerah Mukomuko. Ini semuanya masih proses. Kita mendorong, agar adanya pengembalian 100 persen dana penyertaan modal yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUMD," tukasnya. (hue)